



3.0 | 2019



STIA LAN  
BANDUNG

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## PATOLOGI DEMOKRASI DI INDONESIA

<sup>1</sup>Ipek Permana, <sup>2</sup>Mukarto Siswoyo, <sup>3</sup>Hamirul,

<sup>1,2</sup>Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio Muara Bungo

email, [1iper44@gmail.com](mailto:iper44@gmail.com), [2muksis2000@gmail.com](mailto:muksis2000@gmail.com), [3hrul@gmail.com](mailto:hrul@gmail.com)

### Abstrak

Makalah ini dimotivasi oleh munculnya hoax yang terjadi dalam pemilihan serentak yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019, dengan menggunakan studi literatur penulis ingin mengetahui patologi atau penyakit yang hadir dalam pemilu serentak di Indonesia pada 17 April 2019 dan apa solusi untuk memecahkan masalah patologis ini. Patologi demokrasi yang terjadi di Indonesia meliputi: Kebohongan, Politik Uang, Aturan permainan bersama, Biaya Demokrasi yang Tinggi, Demagogues, Korupsi, Pengumpulan dan Nepotise, Oligarki Politik, Narsisme Karakter, Black Champagne. Sedangkan strategi yang dilakukan untuk meminimalkan, antara lain: E-Voting, Hindari mas kawin politik dengan melakukan Fit and Proper Test untuk Calon Legislatif atau calon pemimpin publik lainnya, dan publik diberikan pendidikan politik yang menjadikan kedewasaan dalam demokrasi.

**Kata kunci:** Patologi, Patologi Demokrasi, Pemilu Serentak

## *Pathology of Democracy in Indonesia*

### *Abstract*

*This paper is motivated by the rise of hoaxes that occur in the simultaneous election which will be held on April 17, 2019, by using a literature study the authors want to find out the pathology or disease that is present in the simultaneous election in Indonesia On April 17, 2019 and what are the solutions to solving these pathological problems. The pathology of democracy that occurs in Indonesia includes: Hoax, Money Politics, Mutual rules of the game, High Cost of Democracy, Demagogues, Corruption, Collection and Nepotise, Political oligarchy, Character Narcissism, Black Champagne. While the strategies carried out to minimize, among others: E-Voting, Avoid political dowry by doing Fit and Proper Test for Legislative Candidates or other prospective public leaders, and the public is given political education that makes maturity in democracy.*

**Keywords:** *Pathology, Democracy Pathology, Simultaneous Election*

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

## A. PENDAHULUAN

Demokrasi dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting hal ini dikarenakan nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. Perkembangan bangsa Indonesia menuju demokrasi sangatlah dramatis dan hal ini yang menjadikan bangsa Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar.

Demokrasi yang ada di Indonesia adalah merupakan alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama didalam masyarakat demi tercapainya pemerintahan yang baik (*good society dan good government*). Sistem demokrasi di Indonesia mempunyai kebaikan bahwa kekuasaan yang ada di tangan pemerintah berasal dari rakyat, baik dilakukan secara langsung maupun perwakilan hal ini secara teoritis membuka peluang terlaksananya aspirasi politik yang dapat disalurkan melalui partisipasi warga negara atau masyarakat terbuka lebar. Dalam demokrasi juga masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan demokrasi dan pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini terutama di tahun politik 2019 ini masih belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan partisipasi warga masyarakat dalam berdemokrasi hal ini disebabkan oleh berbagai patologi yang diderita oleh pelaksanaan demokrasi itu sendiri, dalam artikel ini beberapa bentuk patologi demokrasi yang terjadi di Indonesia serta beberapa cara untuk meminimalisir patologi demokrasi tersebut?

Menurut Rasyid Asba (2011) menyatakan bahwa Demokrasi model manapun, jika ingin berkembang sehat di Indonesia harus serasi dengan latar belakang kulturil yang melingkunginya.

Cara pandang tentang demokrasi ini dari waktu ke waktu mengalami perkembangan hal ini disebabkan semakin kompleksnya hubungan antar warga masyarakat. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, menurut bahasa Yunani, definisi yang paling singkat tentang demokrasi adalah apa yang diucapkan Abraham Lincoln (1863) yaitu pemerintahan

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan hal yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa rakyat memerintah atau melakukan pemerintahan oleh rakyat itu sendiri.

Azra (2005) menyatakan, bahwa upaya untuk menumbuhkan demokrasi di Indonesia melalui pendidikan Kewarganegaraan. Strong (1996) Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dalam mengambil keputusan untuk suatu negara ditetapkan secara sah, bukan menurut golongan atau beberapa golongan, melainkan menurut anggota-anggota komunitas secara keseluruhan. Secara umum terdapat dua model demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Kelsen (2008:204) menjelaskan demokrasi langsung adalah demokrasi dengan derajat yang relative paling tinggi, ditandai fakta bahwa pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh rakyat dalam rapat umum atau pertemuan akbar. Namun prinsip ini hanya dapat dijalankan oleh masyarakat yang berada dalam kondisi sosial yang sederhana. Model demokrasi yang kedua adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Perbedaan kondisi-kondisi serta perkembangan peradaban manusia menciptakan kondisi ketika konsensus bersama tidak mungkin lagi dilakukan dalam kehidupan bernegara. Fungsi pembentukan undang-undang dipindahkan dari warga negara melalui majelis rakyat menuju organ-organ khusus yang dibentuk. Organ-organ ini dibentuk melalui pemilihan umum, dan warga negara bisa mempercayakan aspirasinya dengan mendelegasikan calon kedalam organ khusus ini. Organ khusus ini umumnya disebut Parlemen. Kelsen (2008:408) menjelaskan bahwa organ ini diberi wewenang untuk membuat atau melaksanakan norma-norma hukum tersebut. Prinsip ini merupakan pengurangan dari prinsip penentuan diri sendiri (*self-determined principal*).

Dari penjelasan demokrasi diatas, kesimpulan yang sangat penting sekaligus menjadi akar dari negara berkonstitusi adalah harus menerapkan system demokrasi karena, dalam system demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi langsung dalam setiap

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

penyelenggaraan dan pembangunan negara. Kedua, negara demokrasi merupakan negara yang menempatkan masyarakat sebagai instrument dasar dari segala tindakan pemerintah. Hal ini terjadi karena, dalam system demokrasi, jabatan-jabatan public dapat dipilih dan diawasi langsung oleh masyarakat.

Dari kedua kesimpulan diatas, hal penting bagi negara yang menerapkan asas kedaulatan rakyat adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Negara demokrasi adalah kekuasaan sipil yang berasal dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri, baik melalui demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan, dan masyarakat (konstituen) mendelagikan calon-calon anggota salah satu ide mengenai keterlibatan masyarakat luas dalam menjalankan pemerintahan.

Hamirul, H. (2017) dalam penelitiannya tentang Patologi di kantor pertanahan kota Cimahi dalam melayani publik masih menderita jenis patologi biokrasi yang dimanifestasikan dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsi atau negative, diantaranya: tidak disiplin, berpura-pura sibuk, bersekongkol dan bekerjasama dengan calo. arogansi.

pada penelitian ini dlebih ditekankan pada apa saja bentuk dari patologi demokrasi yang terjadi saat ini dan strategi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir patologi demokrasi tersebut?

## B. PEMBAHASAN

Patologi Demokrasi Di Indonesia yang ditemukan pada hasil penelitian ini adalah: **Hoax / Kebohongan** Hoax atau kebohongan publik yang menjadi penyakit dalam berbagai bidang kehidupan, namun *hoax* ini juga menjadi salah satu patologi demokrasi yang ada di Indonesia, dimana *hoax* . **Money Politik**

Darmawan (2013:11) Secara Umum politik uang adalah suatu bentuk pemberian berupa uang, barang atau janji menyuap seorang seseorang suapay orang tersebut tidak menjalankan haknya untuk memilih seseorang kandidat pada saat pemilihan umum. **Gonta-Ganti Aturan main** Undang-undang tentang parpol, tentang pemilu sering di gonta- ganti

berdasarkan kepetingan golongan atau kelompok tertentu dan hal ini berakibat pada untung atau tidaknya sebuah undang-undang atau peraturan yang dibuat sehingga dalam sisi demokrasi akan tercederai, hal ini berakibat pada ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga legislative sebagai perwakilan mereka dalam menghasilkan Undang-undang yang dapat saja berakibat merugikan masyarakat yang memberikan kepercayaan dalam menentukan nasib mereka.

**High Cost Demokrasi/ Demokrasi Yang mahal** Demokrasi di Indonesia memang sangat unik, dimana bila seseorang mau menjadi calon legislative ataupun menjadi pejabat publik, maka diharuskan memiliki kendaraan politik untuk bisa mencapai tujuan yang di inginkan dan hal ini terkadang tidak sedikit uang yang dibutuhkan untuk memberi mahar politik yang ditawarkan oleh pemilik partai dalam hal suara yang akan didapat untuk menjadi seorang pemimpin dan hal ini menjadi beban untuk calon pemimpin yang mau maju dalam Pilkada akan berakibat pada bila nanti terpilih, maka yang dilakukan pertama kali adalah bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan sehingga membuat para pemimpin yang terpilih memutar otak bagaimana caranya agar modal yang sudah dikeluarkan bisa kembali dalam waktu yang singkat dan bila perlu sekalian keuntungan. **Demagog** ( Citra baik namun membohongi rakyat), **KKN** ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Menurut Al-Attas (1981:31-34) korupsi memiliki tahap-tahap dalam penyebarannya. Pertama, Korupsi terbatas yaitu korupsi yang dilakukan oleh kalanga elit saja. kedua, Korupsi yang sudah merata dilapisan masyarakat dan yang ketiga, korupsi yang sudah membudaya disetiap elemen masyarakat yang sudah sangat sulit untuk diatasi.

Secara umum politik uang diartikan sebagai seni untuk memperoleh kemenangan dalam memperebutkan kekuasaan. Sedangkan uang politik hanya sebagai akses untuk memperoleh kemenangan tersebut ( Sumartini dalam Hastuti, 2012:4). Narsisme para tokoh, dimana para pemimpin memuji dirinya bahwa mereka berhasil dalam melaksanakan pembangunan,

# KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

namun dibalik itu masyarakat tidak dapat merasakan keberhasilannya. *Black Champagne*. *Black Champagne* adalah kampanye hitam yang menjadi suatu cerminan politik di Indonesia pada saat ini, dimana kampanye dilakukan tidak didasari sesuai dengan Undang-Undang dan etika yang berlaku.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Patologi demokrasi yang sudah mengejala di Indonesia antara lain adalah: *Hoax* / Kebohongan; Money Politik; Gonta-Ganti Aturan main; *High Cost* Demokrasi/ Demokrasi Yang mahal; Demagog ( Citra baik namun membohongi rakyat); KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme); Oligarki Politik ( Karena diatur oleh Pemilik Modal); Politik Yang mengunci antara legislative dan executive; Narsisme para tokoh; *Black Champagne*.

### Rekomendasi

**Strategi yang dilakukan untuk meminimalisir Patologi Demokrasi yang ada di Indonesia:**

1. Untuk menghindari jual beli dalam hal suara seharusnya proses pemilu dilakukan dengan e-Voting.
2. Untuk menghindari *high cost* dari pemilu seharusnya mekanisme yang dilakukan oleh partai politik tidaklah menggunakan mahar yang sangat memberatkan calon dan hal ini akan berakibat pada mahalnya biaya menjadi seorang calon pemimpin dan sebaiknya didalam organisasi partai dilakukan Fit dan Profer test untuk kelayakan seseorang menjadi wakil dari partai untuk melaju ke tingkat selanjutnya, begitu pula dengan partai-partai lain yang menjadi calon dilakukan hal yang sama dan kemudian masing-masing wakil partai yang terpilih dilakukan fit dan profer test kembali untuk memilih calon pemimpin sebagai contoh untuk bupati atau gubernur dan melalui mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi dana-dana kampanye yang sangat besar dan diharapkan dengan mekanisme yang mudah dan murah ini dapat menekan para kepala

daerah yang sering melakukan korupsi belakangan ini dan tidak berpikir untuk mengembalikan modal yang sudah keluar sewaktu melakukan kampanye.

3. Masyarakat diberikan pendidikan politik yang membuat pendewasaan dalam berdemokrasi sehingga berita-berita *hoax* menjadi tidak berarti, karena masyarakat sudah pintar dalam menanggapi berita yang datang dan melakukan *cross check* dalam hal berita tersebut akan kebenarannya dan hal ini juga untuk calon pemimpin yang hanya pencitraan dalam dilakukan *cross check* pula terhadap rekam jejak yang sudah dilakukan oleh para calon maupun *incumbent* sehingga didapatkan pemimpin atau kepala daerah yang bersih dan bebas dari KKN.

## REFERENSI

- Alhidayat, N. (2018). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung Dalam Demokrasi Pancasila Di Indonesia. *JPK*, 1-7.
- Alisalman, N. M. (2015). Pengguna media, Norma Kewarganegaraan dan Partisipasi Politik Dalam Era Transisi ke Demokrasi Indoenesia. *Malaysia Journal Of Communication*, 187-204.
- Azra, A. (2005). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Indonesia. *UNISIA*, 219-225.
- Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. *Agama dan Sosial Budaya*, 1-17.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif. *Manajemen Indonesia*, 19-30.
- Hamirul, H. (2017). Patologi Birokrasi Yang Dimanifestasikan Dalam Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional. *Otoritas: Ilmu Pemerintahan*, 14-18.
- Holik, I. (2005). Komunikasi Politik dan Demokratisasi di Indonesia: Dari

## KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

- Konsolidasi Menuju Ke Pematangan. *Madani*, 56-74.
- Konstitusi, M. (2009). *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif*. Jakarta.
- Liddle, R. w. (2012). *Memperbaiki Mutu Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: PUSAD.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Di Indonesia. *Media Hukum*, 241-263.
- Sukamto. (2008). *Dinamika Politik Islam Di Indonesia: Dari Masa Orde Baru sampai Ke Reformasi*. Bandung.